

**PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam Pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

DI SUSUN OLEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ISMAIL
NIM. 10300106031
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2010

*Cinta merupakan sebuah kesucian
Cinta tanpa kesucian
Bukanlah 'Esensi' sebuah cinta*

*Jika kau ingin hidup
Maka kau akan mati
Tapi jika kau ingin mati
Maka kau akan Hidup*

Jikalau saja "KESABARAN" ditulis dalam sejarah peradaban manusia maka nama orangtuaku berada pada urutan pertama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Karya ini kupersembahkan Untuk:
Ayahanda tercinta Muhammad, dan Bunda
Ruhaimah, serta kakakku dan adikku
tercinta dan seluruh keluarga.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam**" Yang disusun oleh Ismail NIM: 10300106031, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 M, bertepatan dengan 13 Jumadil akhir 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Mei 2010 M.
13 Jumadil Akhir 1431 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Drs. Hamzah Hasan, M.HI.	(.....)
Penguji Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Penguji Munaqisy II	: Dr. Abdillah Mustari, S.Ag. M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Nila Sastra Wati, M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NIP: 19581022 198703 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Ismail, Nim; 10300106031, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul *Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam*, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munakasyah.

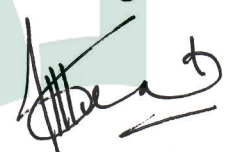
Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 17 Mei, 2010

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi.
NIP. 196312311995031006


Dra. Nila Sastrawati, M.Si
NIP. 197107121997032002

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw., beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua serta kakak-kakak dan adik-adik penulis yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang Pendidikan Dasar sampai pada jenjang Perguruan Tinggi saat ini.
2. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dari berbagai hal apapun.
3. Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan ketatanegaraan, Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan yang banyak mengarahkan Penulis dalam proses belajar.
4. Bapak Drs. M. Thahir Maloko, M.HI. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah

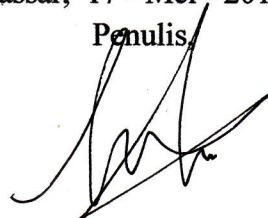
membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini yang dengan bimbingan, arahan, serta berbagai kritikan dan pemikiran yang ditolerirkan memacu semangat Penulis untuk lebih jauh melakukan *jihad intelektual*, kepada keduanya Penulis menghaturkan banyak terima kasih.

5. Buat senior-senior tipalayo terkhusus kanda Basri aco, Spdi, Rahimuddin, Spdi, As'ad Sattari, Spdi, Mawan, SH, yang telah memberikan arahan-arahan selama penulis menempuh jenjang penyusunan Skripsi, saudara-saudara seperjuangan mandar Tipalayo yakni: Achiel, Lheman, A'dal, Uttank, Ucchien, Unchen, Hadi, Aqe, Suhar, Yaya', Awhy, Kalaki, serta teman-teman di pondok Mawar terkhusus Muslimah dan teman-teman di pondok madani yang tergabung dalam Tipalayo Community.
6. Kepada Saudara-saudara seperjuangan di lokasi KKN 2010 yaitu: Andika, Akbar, Amhien, Itha, Bunda Lya, Elha', Dinda, Bunda Fajrin and Rany yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dalam penyusunan SKRIPSI ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Makassar, 17 - Mei - 2010

Penulis,



ISMAIL

NIM. 10300106031

Nama : ISMAIL
NIM : 10300106031
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam

Skripsi ini meneliti dua buah permasalahan, yakni: Bagaimana alasan putusan pengadilan sehingga dapat ditinjau kembali menurut hukum Islam dan bagaimana tatacara peninjauan kembali putusan pengadilan ditinjau dari hukum Islam. Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis mengumpulkan data melalui *library research* Data yang terkumpul, penulis mengolah dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana Cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Asas-asas peradiln agama, yakni personalitas keislaman, kebebasan, perdamaian, sederhana, cepat dan biaya ringan, terbuka untuk umum, legalitas, dan memberi bantuan.

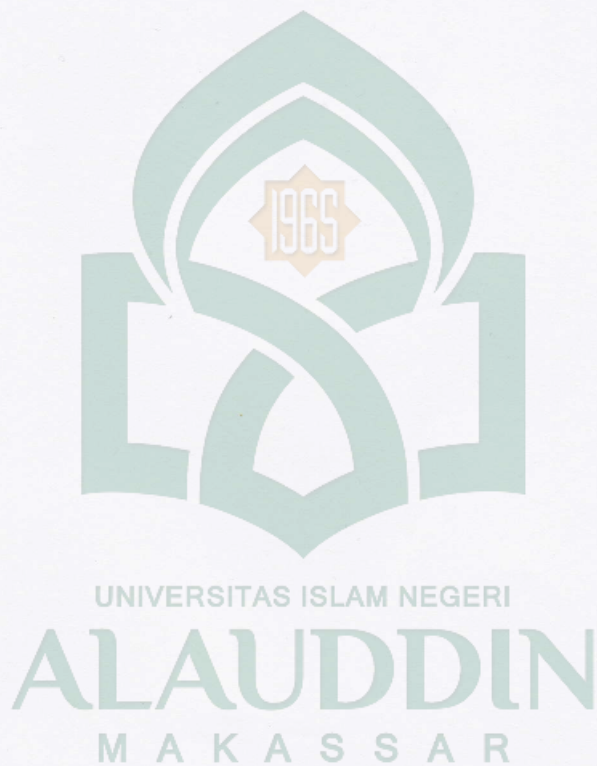
Peninjauan Kembali merupakan penyelesaian atau pemeriksaan ulang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. tetap. Pihak yang mengajukan peninjauan kembali adalah pihak, yang berperkara sendiri dan ahli warisnya. Pihak yang berwenang mengadili adalah di Mahkamah Agung.

Alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali adalah adanya alat-alat bukti yang sangat menentukan ditemukan setelah putusan dijatuhkan. Adanya kekeliruan atau kesalahan yang nyata dari pihak hakim, seperti kesalahan dalam menerapkan hukum formil, Adanya kesalahan yang nyata dari piliak hakim baik menyalahi hukum materil maupun salah dalam menerapkan hukum formil. Tatacara peninjauan kembali atas kekeliruan putusan hakim adalah disampaikan di kepaniteraan pengadilan. Permohonan dalam bentuk tertulis atau lisan dan menyebut alasan. Mengirim salinan permohonan, kepada pihak lawan Tenggang waktu pengiriman salinan putusan selambat-lambatnya 14 hari setelah penerimaan permohonan. Pihak lawan mengajukan jawaban. Tenggang waktu untuk- mengajukan jawaban 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan peninjauan kembali.

Pandangan hukum Islam tentang peninjauan kembali putusan pengadilan adalah sesuai dengan tuntutan keadilan, yakni dengan adanya peninjauan kembali putusan pengadilan merupakan suatu upaya hukum akan pentingnya keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan sebagai manisfestasi adanya hak-hak asasi setiap manusia.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis	5
D. Pengertian Judul	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
 BAB II HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	 10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Peradilan Agama	10
B. Asas-Asas Peradilan Agama	16
C. Alat-alat Bukti Peradilan Agama	33
 BAB III: PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN HAKIM	 50
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali	50
B. Pihak yang Mengajukan Peninjauan Kembali dan Kewenangan mengadili	52
C. Tenggang Waktu Permohonan Peninjauan Kembali	54
 BAB IV ANALISIS PENINJAUAN KEMBALI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	 58
A. Alasan Putusan Pengadilan yang Dapat Ditinjau Kembali	58
B. Tatacara Mengajukan PK	71
C. Pandangan Hukum Islam tentang PK Putusan Pengadilan	75

BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim adalah pemegang kunci terakhir dalam suatu perkara di pengadilan, karena keputusannya yang menentukan kalah atau menangnya pihak yang berperkara, dihukum atau tidaknya si terdakwa, dan berat ringannya hukuman bagi yang telah dijatuhkan putusan. Oleh karena itu, seorang hakim harus benar-benar obyektif dan adil dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara.

Pada putusan hakim, sudah terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat *mutlak*. Putusan hakim sudah mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak kepada para pihak, orang yang mendapat hak dari mereka atau kepada ahli warisnya. Juga dengan sendirinya menurut hukum, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang telah mutlak kepada para pihak serta sekaligus mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang mutlak kepada mereka.¹

Akan tetapi di balik semua itu pembuat Undang-Undang sadar dan *realistic*. Hakim adalah manusia biasa Yang tidak luput dari kekhilafan, jangkauan kemampuannya selalu terbatas, yang suatu waktu bisa lalai dan

¹ Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 407.

khilaf dalam memutuskan perkara. Sekalipun suatu perkara telah melalui terhadap pemeriksaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, pada suatu ketika bisa saja mereka lalai, khilaf dan sebagainya. Kemungkinan lain bisa terjadi apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti oleh hakim pidana dinyatakan palsu, atau setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ataukah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim, seperti ternyata salah dalam menerapkan hukum, baik hukum materil maupun formil.²

Istilah peninjauan kembali dijumpai dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Pasal 21:

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terdapat putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dari pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³

Dengan demikian demi terwujudnya keadilan dan kebenaran, maka setiap putusan hakim yang dianggap keliru, dapat diadakan peninjauan

² Lihat Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, hal. 198.

³ Anonim, *Kumpulan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: AlHikmah, 1993), hal. 110.

kembali. Suatu upaya yang luar biasa, memeriksa dan mengadili atau memutuskan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menanggapi hal tersebut, hukum Islam merupakan. hukum yang inti ajarannya adalah kebenaran dan keadilan Hukum Islam menghendaki agar para hakim yang diberikan amanah untuk menyelesaikan suatu perkara, hendaknya menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Keadilan merupakan amanah dari Allah yang wajib dijalankan oleh Hakim sebagai penegak hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan- Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4):105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا⁴

Terjemahannya:

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang-orang yang tidak bersalah). Karena (membela) orang-orang khianat.⁴

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan, karma kebenaran dan keadilan sesungguhnya adalah Al-Qur'an, sehingga tidak boleh menyelewengkan atau mencari-cari kesalahan orang yang benar, dan membenarkan orang bersalah,

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1995) hal. 139.

dengan dalil nash.

Begitu pula hakim tidak diperkenankan memeriksa atau memutuskan perkara yang apabila salah satu di antara kedua pihak ada rasa permusuhan, ataukah salah satu pihak adalah isteri, ayah atau saudaranya, siapa saja yang memungkinkan untuk memihak.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim yang diberi amanah untuk menyelesaikan perkara, hendaklah menyelesaikan dengan seadil-adilnya. Karma hakimlah yang akan menentukan kalah menangnya salah satu pihak yang berperkara, atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Putusan hakim merupakan putusan yang sudah mutlak dilaksanakan, dan tidak dapat diganggu gugat lagi

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan, pokok masalah yang timbul adalah: Bagaimana peninjauan kembali ditinjau dari hukum Islam ?

Pokok masalah tersebut, dapat dijabarkan dalam dua sub Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan putusan pengadilan sehingga dapat ditinjau kembali menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana tatacara peninjauan kembali putusan pengadilan ditinjau dari hukum Islam?

⁵ Lihat Muhammad salam Madkur, *Al-Qadla Fil Islam* ([http: Daar Nandah](http://DaarNandah.com)), hal. 94.

C. Hipotesis

Dari permasalahan tersebut, dapat diberikan jawaban sementara sebagai berikut:

1. Alasan-alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali, yakni: adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum formal dan kekeliruan dalam menerapkan hukum materiil, dan sebagainya.
2. Tatacara peninjauan kembali, antara lain: disampaikan di Kepaniteraan pengadilan, permohonan berbentuk tertulis dan menyebut alasan, membayar biaya perkara yang diperlukan, pengiriman salinan permohonan kepada pihak lawan, tenggang waktu pemberian 14 hari dari tanggal penerimaan, pengiriman berkas perkara dan sebagainya.

D. Pengertian Judul

Judul skripsi adalah *"Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam"*

1. "Peninjauan Kembali" yakni, "peninjauan", berarti pemeriksaan, penyelidikan.⁶ Dan kata "kembali", berarti balik menuju tempat semula; kembali kepada asalnya semula; pengulangan, mencabut (keputusan perkara).⁷ Jika digabungkan menjadi "Peninjauan Kembali", berarti pemeriksaan atau penyelidikan ulang. Dan yang dimaksud peninjauan

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 1078

⁷ *Ibid*, hal. 463

kembali dalam skripsi ini adalah penyelidikan atau pemeriksaan ulang putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. "Ditinjau", berarti pandangan sesudah mempelajari atau menyelidiki.⁸

3. "Hukum Islam", adalah:

هي التظم التي شن عما لله هو سرع انو لهاليه جفر الامان بهاته فعلاخة حي به
وعلاقته جأخيه المسلم وعلاقة باحميه الاحسان وعلاقته باخكون وعلاقته بالحياة⁹

Artinya:

Hukum Islam adalah: Peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah pokok-pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam, dan hubungannya dengan hidup.⁹

Secara teknis, yang penulis maksudkan dengan hukum Islam di sini adalah hukum Acara dalam peradilan Islam yang di dalamnya dimungkinkan peninjauan kembali putusan hakim yang keliru atau terdapat kesalahan.

Berdasarkan pengertian istilah yang terdapat dalam judul tersebut, secara operasional pengertian judul skripsi ini adalah suatu kajian mengenai peninjauan kembali ditinjau dari Hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksud di sini adalah, bahwa skripsi atau masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini telah ditunjang oleh

⁸ *Ibid*, hal. 463

⁹ Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa Syar'ah* (Mesir: Maktabah Wa Matbaaldi, 1974), hal. 12.

beberapa literatur, antara lain:

1. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, karangan M. Yahya Harahap, antara lain membahas tentang kemungkinan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang dianggap keliru.
2. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* karangan H. Roihan A. Rasyid, membahas antara lain bahwa peninjauan kembali adalah peninjauan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama termasuk Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sebagainya.
3. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, karangan. Sudikno Mertokusumo, yang membahas antara lain upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada. Mahkamah agung, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa argumen tersebut, secara umum membahas tentang adanya kemungkinan peninjauan kembali pada suatu putusan. Hal yang membedakan dengan pembahasan penulis adalah bahwa dalam buku-buku tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai peninjauan kembali putusan hakim ditinjau dari Hukum Islam, sehingga penulis berkesimpulan bahwa judul skripsi ini belum pernah dibahas.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis, yakni mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
- b. Pendekatan syar'i, yakni mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam Syari'at Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan metode kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas antara lain: Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengannya, kitab-kitab Fikih khususnya yang berkaitan dengan peradilan. Tafsir dan Syarah Hadis, dan lain-lain buku penunjang.

3. Metode Pengolahan Data

Data yang dipergunakan dalam oembahas ini bersifat kualitatif. Karenanya untuk menemukan yang diinginkan penulis mengolah data yang ada' selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan. Dalam mengolah data tersebut, penulis menggunakan metode:

- a. Metode induktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yakni menganalisis data baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dibandingkan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang lebih kuat.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah, upaya untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peninjauan kembali ditinjau dari Hukum Islam, terutama mengenai:
 - a. Untuk mengungkap tentang alasan-alasan putusan hakim sehingga dapat ditinjau kembali ditinjau dari Hukum Islam?
 - b. Untuk mengetahui tatacara peninjauan kembali ditinjau dari hukum Islam?
2. Adapun kegunaannya adalah diharapkan agar pembahasan skripsi ini dapat menjadi bahan informasi positif bagi masyarakat baik terhadap Para pencari keadilan maupun terhadap para hakim dari sebagainya.

BAB II

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, akan dikemukakan Pengertian Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum Perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum Perdata materiil¹. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya.² Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan

¹ R. Supomo, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hal. 13.

² *Ibid.*

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak.³

Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama adalah:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari Syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil bagi yang beragama Islam di Indonesia, yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.⁴

2. Sumber Dasar Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, diberi wewenang oleh Peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan

³ Lihat Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 2.

⁴ H. Ruihan A. Rasy'id, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 10

hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.⁵

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga. Acara dalam hukum tidak tertulis, yakni hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi kongkrit.⁶

Sebagai dasar Hukum Acara Peradilan Agama tersebut, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁷

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber kepada dua aturan, yaitu: 1. yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan 2. yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum.

⁵ *Ibid*, hal. 20.

⁶ *Ibid*.

⁷ H.Zain Badjeber, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentari* (Jakarta: Pustaka Amani,), hal. 19.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, yakni untuk, Jawa dan Madura.
2. Rsv (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justine.
3. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau, disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
4. Undang-Undang No-2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.⁸

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan. PP Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.⁹

Dengan demikian, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁸ Lihat H. Roihan, *op-cit*, hal. 21.

⁹ *Ibid.*

1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan.

Sehubungan dengan itu, H. Roihan mengemukakan bahwa pada suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan proses hukum menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.

Sebagai contoh mempergunakan proses hukum menurut Islam, yakni: Suatu kasus, suami memohon untuk menceraikan isterinya ke Pengadilan Agama dengan alasan isterinya telah berzina dari suami telah mengajukan alat bukti berupa seorang lelaki beragama Islam sebagai saksi. Dapatkah Pengadilan Agama memutuskan telah terbukti zina atau langsung saja menolak permohonan karena tidak terbukti.¹⁰

Penyelesaiannya ialah sebagian berpedoman kepada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989:

Dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya penegakan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.¹¹

Kata-kata "bukan tiada pembuktian sama sekali" karena sudah ada sebagian bukti yaitu seorang laki-laki. Karena itu suami atau pemohon bersumpah dengan berpedoman kepada acara menurut Islam. Menurut

¹⁰ *Ibid*, hal. 22.

¹¹ H. Zain Badjeber, *op- cit*, hal. 27.

Islam, bila seorang suami menuduh isterinya berzina, Ia wajib membuktikan dengan empat orang saksi lelaki beragama Islam, atau dapat diganti dengan mengucapkan sumpah *Li'an*.¹²

Selanjutnya, seandainya sama sekali tidak bukti selain daripada si suami itu sendiri yang melihat atau menyaksikan isterinya telah berzina, menurut Pasal 87 ayat (1) tersebut tentu suami tidak dapat mengucapkan sumpah *Li'an* karena termasuk dalam istilah "bukan tiada pembuktian sama sekali."¹³

Namun, menurut Hukum Acara Islam hal itu adalah boleh. Sebagai dasar, dapat dipahami firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nur (24): 6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama masih berserak-serak juga, sebab Undang-Undang No.7 Tahun 1989 hanya sedikit memuat tentang Acara, padahal peraturan perundang-

¹² Lihat H. Roihan, *loc. cit.*

¹³ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), hal. 544.

undangan yang ditunjuk berlaku sebagai Hukum Acaranya cukup banyak.

B. Asas-Asas Peradilan Agama

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas pertama Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman. Bagi yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan Agama.

Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan Agama. Karenanya, ketundukan personalitas muslim kepada. lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan personalitas. Muslim kepadanya hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu. Lebih jelas, dapat dirangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹⁵

Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan hal-hal yang termasuk dalam bidang perdata tertentu tersebut, yang berbunyi: "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam" Dari apa yang tercantum dalam, Penjelasan Umum, tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam. pasal 49 ayat 1, yakni:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Wakaf dan sedekah.¹⁶

Jika ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, maka dalam asas personalitas ke Islaman yang melekat pada UU No.7 Tahun 1989 dijumpai beberapa pengesahan yang melekat membarengi asas dimaksud:

¹⁵ Lihat H. Zaire Badieber, Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 3.

¹⁶ *Ibid*, hal. 7.

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaian berdasarkan hukum Islam.¹⁷

Analisis di atas memperingatkan, asas personalitas ke Islaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal yang seperti itu sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum. Begitu pula landasan hubungan hukumnya, harus berlandaskan hubungan hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum barat.

Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas ke Islaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu sengketa perkawinan yang terjadi

¹⁷ *Ibid.* hal. 8.

antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan pengadilan Agama, tetapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Patokan ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekaligus salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Jadi Penerapan asas personalitas ke Islaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas ke Islaman harus selalu didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketanya *mutlak* atau *absolut* tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasar hukum Islam.¹⁸

Letak patokan asas personalitas ke Islaman berdasar patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan menentukan ke Islaman seseorang berdasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas ke Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke

¹⁸ Lihat M. Yahya. Harahap, *Kedudukan Kewenangan Wawancara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1939* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 38.

Islaman. Faktornya dapat ditemukan dari KTP, Sensus Kependudukan, SIM dan Surat Keterangan lain, bisa juga dari kesaksian. Sedang mengenai Patokan asas personalitas ke Islaman berdasar saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam,
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁹

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas ke Islaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewajiban Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah di belakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seseorang di antara mereka telah bertukar agama dari Islam ke agama lain.

Misalnya, pada saat dilangsungkan perkawinan, suami isteri sama-sama beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau isteri beralih dari agama Islam, dan terjadi sengketa perceraian. Dalam proses ini telah terpenuhi asas personalitas ke Islaman. Sengketa perceraian tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peralihan agama dari suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada perkawinan tersebut. Patokan yurisprudensi yang secara normatif

¹⁹ *Ibid*, hal. 39.

menegaskan: Setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian), bukan berdasar hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa perkara, berdasarkan hukum Islam. Sebaliknya, jika pada saat terjadi hubungan hukum, keduanya atau salah satu pihak tidak beragama Islam, tetapi pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu pihak telah menganut agama Islam. Pada kasus yang seperti itu tidak tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Karena untuk menentukan asas personalitas ke Islaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi ditentukan oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan hukum berlangsung.²⁰

2. Asas Kebebasan

Pada dasarnya, asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1989, merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Memang seperti yang diaturkan berulang kali Pada bagian konsideran maupun pada penjelasan umum, UU No.7 Tahun 1989 merupakan salah satu upaya melaksanakan

²⁰ *Ibid.* hal. 40.

UU No.7 Tahun 1970. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum angka 1 alinea kelima ditegaskan : "Dengan demikian Undang-Undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan data asas yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dari bunyi rumusan penjelasan dimaksud, UU No.7 tahun 1989, merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 1970. Oleh karena itu asas-asas umum yang diatur di dalamnya harus konsisten dengan asas yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 1970.²¹

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, merupakan asas yang paling central dalam kehidupan peradilan. Dalam UU No.14 Tahun 1970 dicantumkan dalam Bab 1, Ketentuan Umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila", demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Memperhatikan bunyi pasal tersebut dapat dijabarkan beberapa sendi filosofi dalam kegiatan upaya penegakan hukum yang diperankan oleh badan-badan peradilan:

- a. Kekuasaan kehakiman adalah alat kekuasaan negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif.

²¹ *Ibid.*

b. Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan fungsi peradilan:

- Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan,
- Dan agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena memang negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.²²

3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah*. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, Sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua. pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimana zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain

²² *Ibid.* hal. 41.

halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak Yang bersengketa, terbatas dari kualifikasi dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan Tidak dibebani dendam kesumat yang berkepaniangan.²³

Sangat disayangkan, tujuan luhur mendamaikan pihak yang berperkara sering dikotori dan dinodai sementara hakim. Praktek fungsi mendamaikan, menyimpang dari keseluruhan dan menjelma dalam bentuk pemaksaan dan perkosaan. Praktek fungsi mendamaikan yang diperankan sementara hakim, persis memperagakan filsafat "belah bambu", yaitu bagian sebelah diinjak dan yang sebelah diangkat. Dengan pertama perisai fungsi mendamaikan, sementara hakim bertindak menjadi aktor dan sekaligus mantel. Hakim yang membidani dan melahirkan perdamaian sesuai keinginan pihak Yang hendak diangkat- Pihak yang diinjak sama sekali tidak didengar dan tidak dibawa serta sesudah hakim siap menyusun perdamaian menurut keinginan pihak yang hendak diangkat, tanpa setahu pihak yang diinjak, hakim memalu godamnya dengan martil. Akhirnya perdamaian yang terjadi lebih kejam dari perkosaan. Sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka pada pihak yang diinjak, Berapa banyak pengalaman bercerita akan kasus perdamaian yang seperti itu dalam

²³ Lihat H. Roihan. *op. cit.* hal. 133.

praktek peradilan. Banyak laporan dan pengaduan yang bernada praktek peradilan belah bambu. Cuma sering pengaduan dan laporan mereka lenyap oleh keangkeran "*Formil*" atas alasan perdamaian yang terwujud yang dituangkan dalam "*putusan perdamaian*" sudah memenuhi syarat-syarat formil. maka penegakan hukum dari keadilan pun bungkam dan terkubur oleh keangkuhan aturan "*formal*" .²⁴

Sampai di mana peran hakim mendamaikan pihak-pihak Yang berperkara? Perannya terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar "*hash kesepakatan*" kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata (BW) maupun dari segi hukum Islam termasuk pada bidang "*hukum perjanjian*" yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya "*kesepakatan*" berdasar kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada faktor yang mengandung kekhilafan, paksaan dalam bentuk segala bentuk baik yang bersifat fisik dan psikis atau penipuan. Syarat kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat, didasarkan atas sebab yang halal. Paling tidak hal ini harus dipahami dan disadari hakim dalam

²⁴ Lihat. M Yahya Harahap. *op. cit.* hal. 46.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU No.7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat 3. Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan pasal 4 ayat 2 itu sendiri.

Dalam Penjelasan Umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi :

Ketentuan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetap harus dipegang teguh Yang tercermin dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana."²⁶

Selanjutnya maksud dan Pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat; tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang tiaras dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang rendah sehingga dapat dipikul oleh rakyat. ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.²⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu asas hukum

²⁵ *Ibid.* hal. 47.

²⁶ Hasbullah Siawie, *Kumpulan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Lingkungan Peradilan* (Jakarta: .Lentera, 1993), hal. 23.

²⁷ *Ibid.* hal. 24.

Acara Peradilan Agama adalah asas sederhana cepat dan biaya ringan, yaitu menghendaki adanya suatu proses persidangan atau beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Secara harfiah, makna pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum, berarti setup pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dari pihak-pihak yang berperkara dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat dan mendengar pemeriksaan. Bukan hanya pintu, jendela ruang sidang pun harus terbuka. Maka untuk memenuhi syarat formil alas asas ini, sebelum hakim mulai melaksanakan pemeriksaan, lebih dahulu dia menyatakan dan mengumumkan persidangan terbuka untuk umum. Kelalaian memenuhi syarat formil tersebut dapat dianggap melanggar tata tertib pemeriksaan. Sekalipun ada yang berpendapat kelalaian atas syarat formil ini tidak berakibat pemeriksaan batal, hal itu tidak mengurangi artinya sebagai salah satu tata tertib yang melekat pada pemeriksaan persidangan.²⁸

²⁸ Lihat M. Yahya Harahap. *op. cit.* hal. 57.

Tujuan utama yang terkandung dalam asas persidangan terbuka, agar jangan sampai terjadi pemeriksaan gelap dan bisik-bisik. Bukankah dalam pemeriksaan yang tertutup lebih cenderung untuk melakukan pemeriksaan yang menyimpang dan sewenang-wenang. Untuk menghindari kecenderungan yang seperti itu dan agar jalannya sidang pemeriksaan berlangsung dalam suasana *fair trail* (pemeriksaan sidang yang fair), tidak memihak dan tidak berat sebelah, Undang-Undang merasa perlu mempersilahkan masyarakat untuk menyaksikannya. Dalam pelaksanaan penegakan *fair trail* salah satu tujuan utama asas persidangan terbuka untuk umum. Segi lain, asas ini juga berdampak edukasi dan prepensi. Pemeriksaan sidang yang terbuka untuk umum dapat menjadi bahan informasi yang terpantul dari kasus peristiwa yang diperkirakan akan memberi pelajaran bagi masyarakat bagaimana sikap dan tingkah laku yang sebaiknya diperankan agar tidak terperosok ke arah yang tidak tepat. Perkara yang sedang diperiksa bermanfaat menjadi bahan perbandingan bagi masyarakat untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akan membentuk daya tangkap prepensi dalam hati dan pikiran mereka untuk melakukannya.²⁹

²⁹ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1989), hal. 13.

6. Asas Legalitas

Asas lain yang menjadi landasan Hakim melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan (kekuasaan kehakiman) ialah asas legalitas. Asas legalitas tercantum dalam pasal 58 ayat 1. Bunyi pasal ini persis sama dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."³⁰

Kalau rumusan pasal ini diperhatikan, asas legalitas yang terdapat di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan. Memang asas legalitas itu sendiri pula pada hakekatnya termasuk salah satu bentuk dari hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum sehingga. Dalam pasal ini tergabung dua jenis hak asasi. Pertama hak asasi perlindungan hukum dan hak persamaan hukum. Oleh karena itu, pembahasannya akan dirangkai dalam urutan makna asas legalities yang diteruskan dengan makna persamaan hukum yang disebut juga asas equality.³¹

Pengertian makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Pengadilan mengadili menurut hukum sama maknanya dengan pengadilan mengadili berdasar *rule of law*. Jika asas legalitas dikaitkan dengan kedudukan negara. Republik Indonesia adalah negara hukum, sudah

³⁰ Lihat M. Yahya harahap. *op. cit.* hal. 58.

³¹ *Ibid.* hal. 58.

semestinya yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum, Dengan demikian baru terjadi suatu ketentuan tindakan dan arah law enforcement bertindak menurut *rate of law*. Hal tersebut berarti Hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan peradilan, tidak boleh bertindak di luar hukum semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hukum. Mulai dari tindakan pemanggilan pihak yang berperkara, penyitaan, pemeriksaan dan persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus menurut dan berdasar hukum, tidak boleh menurut selera dan kemauan Hakim, . Hukum berada di atas segala-galanya, hukum yang memegang supremasi dan dominasi. Hakim dari siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang tidak dibenarkan hukum. Demikian gambaran nyata makna asas legalitas dari sudut pendekatan teoritis.³² Tetapi hal yang dicita-citakan asas ini, masih jauh dari kenyataan. Dalam kenyataan konkret, masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh mereka yang berpredikat sebagai abdi penegak hukum . Pelanggaran hukum tersebut terkadang dilakukan dengan radar dan sengaja untuk maksud-maksud tertentu. Terkadang pelanggaran hukum terjadi karena tergila-gila memamerkan

³² *Ibid.*

kecongkakan kekuasaan yang menuntut segala penghormatan dan pelayanan dari rakyat pencari keadilan. Hukum mereka cemari dan belakangan Lupa diri sebagai pelayan dan abdi penegak hukum dan keadilan.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim bertindak memimpin jalannya persidangan, yaitu hakim yang mengatur dari mengarah tata tertib pemeriksaan. Juga hakim yang berwenang menentukan hukum yang ditetapkan, serta dia yang berwenang memutus perkara yang disengketakan. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin sidang terdapat dua aliran. Aliran pertama, meletakkan kepemimpinan Hakim dalam kedudukan yang pasif. Aliran ini dianut oleh Reglement of de Rechtsvodering, Yang dulu berlaku sebagai hukum acara perdata bagi golongan Eropa di depan Rechts Vordering, kedudukan hakim memimpin sidang hanya bersifat mengawasi yakni kedudukannya pasif. Hakim hanya sekedar mengawasi jalannya proses, agar para pihak yang berperkara bertindak sesuai dengan tata -tertib beracara yang ditentukan. Menjaga dan mengawasi agar para pihak tidak menyimpang dari garis yang ditentukan.³³ Jadi fungsi dan kedudukan hakim hanya menjaga dan mengawasi tata tertib, seolah-olah sebagai penonton di luar arena. Hakim

³³ *Ibid.* hal. 59.

tidak ikut mencampuri tindakan para pihak selama tidak ada pelanggaran tata tertib berbicara. Kedudukan pasif, sesuai dan sejalan dengan sistem yang dianut Reglement of de Recht vordering yang menggariskan sistem daagvaarding yang menetapkan semua tingkat proses dilakukan secara tertulis serta procureur stelling yakni para pihak wajib dibantu seorang pengacara dalam berproses.

Berdasar sistem beracara secara lisan, pada prinsipnya pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan di antara pihak-pihak berlangsung secara tanya jawab dengan lisan. Atau sebaliknya, proses pemeriksaan lisan boleh. Diganti dengan jawaban tertulis. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk melangsungkan proses pemeriksaan secara surat-menyurat, terutama di kota-kota besar. Pada saat sekarang sudah berkembang profesi penasehat hukum, hampir semua pihak yang berperkara telah melimpahkan kuasa kepada penasehat hukum sehingga proses pemeriksaan perkara perdata sudah cenderung mengarah kepada proses surat menyurat.

Terlepas dari perkembangan praktek yang cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan surat menyurat, hukum acara perdata yang diatur dalam HR Jan RBG sebagai hukum acara yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum, dengan kekuatan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan resmi berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama, yakni menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta

tidak wajib para pihak dibantu atau didampingi penasehat hukum (pengacara). Berdasar sistem tersebut, HIR dan RBG menetapkan kedudukan hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang aktif. Hal itu ditegaskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 RBG. Rumusan pasal-pasal ini, sama dengan rumusan pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo pasal 5 ayat 2 ULT No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi :

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas-asas Peradilan Agama yakni asas personalitas ke Islaman, yakni Peradilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam; asas kebebasan, yakni asas kemerdekaan atau kebebasan kekuasaan kehakiman; asas wajib mendamaikan, yakni hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

C. Alat-Alat Bukti Peradilan Agama

Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR. Pasal 284 Rbg. Pasal 1866 BW) ialah: a. Alat bukti tertulis, b. Alat bukti saksi, c. Alat bukti persangkaan-persangkaan, d. Pengakuan, e.

³⁴ Lihat Hasbullah F. Siawie, *op-cit.* , hal. 11.

Sumpah.³⁵

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³⁶

Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi dua, yakni: Surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya Yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.³⁷

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk menjadi alat bukti.

Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta-akta yang dibuat oleh A dan B dapat di dentif dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup,

³⁵ Sudikn, *op. cit.* hal. 119

³⁶ *Ibid*, hal. 120

³⁷ *Ibid*.

karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.³⁸

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya, dan pejabat yang dimaksud antara lain: notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.³⁹

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang, sepihak, untuk membayar sejumlah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid. hal. 121.*

⁴⁰ *Ibid. hal. 123.*

uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula di bawah dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk melanjutkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.⁴¹ 39

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti menurut ketentuan hukum Acara Perdata di Indonesia adalah, alat bukti tertulis atau surat baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam juga mengenal alat bukti yang berbentuk tulisan. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh H. Roihan bahwa surat-surat atau tulisan, apa dan betapapun bentuk, sifat dan isinya tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja maupun tidak. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa hidup ribuan tahun, Jika Allah dan Rasul-Nya mengakui bahwa manusia (saksi) adalah alat bukti maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan akalnya lalu dicetuskan dengan lisan, maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud lewat Surat atau tulisan.⁴²

⁴¹ *Ibid.* hal. 127.

⁴² H. Roihan A. Rasyid. *op.cit.*, hal. 145.

2. Keterangan Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁴³

Dalam Hukum Acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan.⁴⁴

Dalam suasana hukum adat dikenal dua macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.⁴⁵

Hal yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengan atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang

⁴³ Sudikno. *op.cit.*, hal. 134

⁴⁴ Retno Wulan Susanto, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek* (Bandung : Mandar Maju, 1989), hal. 63

⁴⁵ *Ibid.*

diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.⁴⁶

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, yakni para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari kebenaran sendiri.⁴⁷

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tanpa dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. sehingga kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.⁴⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan menurut ketentuan Hukum Acara perdata di Indonesia adalah, keterangan saksi, yakni suatu kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan oleh orang yang bukan dari salah satu pihak yang berperkara.

Dalam hukum Islam kesaksian atau keterangan saksi disebut *syahadah*. Syahadah adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lapaz

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sudikno *op.cit.*, hal 135.

⁴⁸ *Ibid.*

kesaksian untuk menetapkan hukum.⁴⁹

Dalam kaitan tersebut, Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa kesaksian (syahadah) itu dapat diambil dari kata *Musyahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) tersebut menyampaikan atau memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa diketahui dengan lapadz: Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (syahdu atau syahidtu).⁵⁰

Syahadah (kesaksian) juga berasal dari kata *I'llam* (pemberitahuan). Hal ini dapat dipahami firman Allah SWT antara lain dalam Q.S. Ali Imran (3):18 sebagai berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Terjemahnya:

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia ..".⁵¹

Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa arti dari kata pada ayat tersebut adalah alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dari menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁵²

⁴⁹ Lihat Muhammad Salam Makdur, *Al-Qadla Fil Islam* (Kairo : Dar An-Nahda, 1970), hal 84

⁵⁰ Sayyid. Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kuwait : Dar -Al- Bayan, 1971), hal 332

⁵¹ Departemen RI. *op.cit.* hal. 78

⁵² Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

Dasar hukum syahadah (kesaksian), antara lain fir-man Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki (diantara kamu), jika tidak ada orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi akan mengingatkannya.⁵³

3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan Yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Hal yang menarik kesimpulan tersebut adalah Misalnya, apabila seorang anak telah dipelihara, dikhitkan serta dikawinkan oleh keluarga A, meskipun ia sesungguhnya adalah orang lain, ia memanggil "ma" dan bapak kepada A, hal tersebut memberi persangkaan hakim bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari A.⁵⁴

Persangkaan hakim juga adalah sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang didasarkan atas perzinaan. Adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi yang melihat sendiri waktu perzinaan

⁵³ Rertno Wulan *op.cit.* hal. 70

⁵⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 70

tersebut terjadi- Oleh karena itu sudah menjadi yurispundensi tetap, bahwa apabila dua orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri itu tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur, maka untuk perbuatan perzinaan telah terdapat satu persangkaan hakim.⁵⁵

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau tidak akan diberi kekuatan tetapi juga pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan telah terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu baru merupakan lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan – persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.⁵⁶

Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak dalam perkara persidangan, misalnya pihak yang bersangkutan meskipun sekali-kali diperintahkan untuk menghaturkan pembukaannya, ia kini tidak memenuhi perintah tersebut, dapat menelorkan persangkaan hakim. bahwa pembuktiannya itu tidak lengkap dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggungjawaban. Juga jawaban yang mengelak,

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* hal. 71

jawaban yang tidak tegas, memberi persangkaan bahwa dalil pihak lawan adalah benar, setidaknya-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut.⁵⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia adalah, persangkaan-persangkaan, yakni petunjuk atau kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa dan sebagainya.

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, persangkaan-persangkaan disebut *Qarinah*. *Qarinah* menurut Sayyid Sabiq adalah tanda yang mencapai batas keyakinan Hal tersebut sebagaimana contoh yang dikemukakan bahwa seseorang keluar dari rumah yang sepi dalam keadaan pucat dan ditangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah, kemudian di dalam rumah tersebut didapati seseorang telah disembelih pada waktu itu, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan adalah orang yang telah membawa pisau tadi.⁵⁸

Adapun gambaran dalam Alqur'an, dapat dilihat pada Q-S-Yusuf (12):26-27 sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sayyi Sabiq *op.cit.* hal 53

إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ كَانَتْ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

... Jika kamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju kamisnya koyak di belakang maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.⁵⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya baju yang sobek dapat memberikan petunjuk, yakni jika bagian muka berarti Yusuf yang bersalah, dan jika bagian belakang maka Yusuf di pihak yang benar.

Peristiwa lain ketika Nabi Sulaiman didatangi dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak yang masing-masing mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemudian diadili oleh Nabi Daud dan diputus dengan kemenangan dipihak perempuan yang lebih tua. Lalu Nabi Sulaiman yang ikut hadir dalam Majelis Pengadilan itu berkata: Berilah aku sebilah pisau yang akan kupergunakan membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa, kemudian yang tua memperkenalkan tindakan Nabi Sulaiman, sedang yang muda berkata janganlah engkau lakukan itu, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya atasmu, berikanlah anak itu kepadanya (kepada perempuan tua itu). Akhirnya

⁵⁹ Departemen Agama RI. *op.cit.* hal. 45

anak tersebut diserahkan kepada perempuan yang muda berdasarkan garinah atau petunjuk bahwa dialah yang menampakkan rasa kasihan kepadanya dan mencegah dipotong anak tersebut menjadi dua bagian, dimana perempuan yang tua justru mengizinkannya.⁶⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan menurut Hukum Acara. Peradilan Islam adalah *garinah* atau petunjuk atau persangkaan-persangkaan.

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Jadi dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang

⁶⁰ Sayyid Sabiq. *Loc. cit.*

kebenaran, sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara.⁶¹

Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu: 1). Pengakuan yang dilakukan di depan sidang, dan 2). Pengakuan yang dilakukan di luar sidang.

Kedua macam pengakuan tersebut, satu sama lain berbeda dalam nilai pembuktian. Menurut ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, atau diucapkan oleh orang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Sebaliknya dalam Pasal 175 HIR diatur perihal pengakuan yang dilakukan di luar sidang, yang menyatakan bahwa diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan hakim, akan menentukan kekuatan mana diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.⁶²

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan kata lain

⁶¹ Retnowulan, *op.cit.* hal. 73.

⁶² *Ibid.* hal. 74.

perkataan merupakan bukti bebas. Hal tersebut berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan dan pembuktian, atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan.

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.⁶³

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam alat bukti pengakuan atau keterangan terdakwa disebut *Al-Iqrar*. Dalam istilah syara' *iqrar* berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. *Iqrar* merupakan dalil yang terkuat untuk menyatakan dakwaan pendakwa. Karena itu *iqrar* raja dari pembuktian, dan dinamakan pula kesaksian diri.⁶⁴

Para ulama telah bersepakat bahwa *iqrar* itu disyari'atkan oleh kitab dan sunnah, sebagai dasar tersebut dapat dipahami firman Allah SWT, antara lain dalam Q.S. an-Nisa'(4): ayat 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sayyid Sabiq. *op.cit*, hal. 329

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ---⁶⁵

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim menurut Hukum Acara Peradilan Islam adalah ikrar atau pengakuan si terdakwa atau tergugat atau termohon.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁶⁶

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu benar demikian atau tidak. Termasuk sumpah yang pertama ialah sumpah saksi dan sumpah saksi ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan

⁶⁵ Departemen Agama Ri, *op.cit.*, hal. 144.

⁶⁶ Sudikno, *op.cit* hal. 154.

memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya; sedang sumpah yang benar adalah, sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk menentukan suatu peristiwa.⁶⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang telah ditetapkan menurut Hukum Acara Perdata adalah, alat bukti sumpah atau janji yang telah diucapkan di muka Pengadilan atau sidang Pengadilan.

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, juga dikenal alat bukti sumpah. Bila seorang pendakwa mendakwakan suatu hak pada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa meningkari hal itu, maka tidak ada cara lain selain sumpah dari orang yang di dakwa. Sebagai dasar tersebut, sabda Rasulullah SAW.:

عن عبد الله ابن عباس قال رسول الله لو يبط الناس بد غواهم لا دعن ناس ل عاء
رجال وامواكم ولكن البينة على المرعر والبينة على عن انكر⁶⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas; bahwa sanya. Rasulullah SAW telah memutuskan bahwasanya tanda bukti itu bagi orang yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang terdakwa.(H.R- AL-Tirmidzi).⁶⁸

Pada Hadis lain, Sabda. Rasulullah SAW:

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ H. Roihan A. Rasyid. *Op.cit* hal. 139.

عن عبد الله ابن عباس قال رسول الله ص.م لو يعط الناس بد عواهم لا دعى ناس
دماء رجال و امواكم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر⁶⁹

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk peristiwa tertentu) dibebankan untuk pembuktian dan (bagi mereka. yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. (H.R. dan Muslim).⁶⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu atau bukti yang dapat dijadikan landasan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan menurut Hukum Acara Peradilan Islam adalah, sumpah atau ikrar terutama dari pihak terdakwa atau tergugat.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.* hal. 48.

BAB III

PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali

1. Pengertian Peninjauan Kembali

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, bagian keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sudah termuat pengertian apa yang dimaksud peninjauan kembali. Judul tersebut adalah "Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".¹ Dari judul tersebut sudah jelas apa arti peninjauan kembali yakni pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali yang dimaksud adalah terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap keputusan pengadilan tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung, Karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi "peninjauan kembali terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Peninjauan kembali tersebut, diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang didahuluinya memutus, dengan alasan dan

¹ Lihat M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Putusan Kartini, 1990), hal. 407.

syarat tertentu.²

2. Hukum Peninjauan Kembali

Istilah peninjauan kembali dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan Pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³

Dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU No.14 Tahun 1985 Pasal 66 sampai dengan pasal 77, sebelumnya peninjauan kembali diatur dalam beberapa peraturan MA (SEMA 6/1967, peraturan-peraturan MA 1/1969 mencabut SF24A 6/1967 SEMA 18/1969 membukukan peraturan-peraturan MA 1/1969, perMA 1/1971 mencabut peraturan-peraturan MA 1/1969, peraturan-peraturan MA 1/1976 mencabut peraturan-peraturan MA mengenai peninjauan kembali, peraturan-peraturan MA 1/1980 yang disempurnakan oleh peraturan-peraturan MA 1/1982).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum adanya peninjauan kembali, terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman; yang diatur di dalam Pasal 66 sampai Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Tentang Mahkamah Agung.

² *Ibid.*

³ Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

B. Pihak yang Mengajukan Peninjauan Kembali dan Kewenangan Mengadili

1. Pihak berhak mengajukan peninjauan kembali

Pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 68 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang isinya sebagai berikut: (a) permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, (b) apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia. Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli Warisnya

Selama proses pemeriksaan PK masih berlangsung, pemohon meninggal dunia, permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Misalnya, A mengajukan permohonan PK, sebelum putusan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, A meninggal dunia, maka permohonan dianggap gugur akan tetapi ahli waris si A dapat melanjutkan.⁴

2. Pihak yang Berwenang Mengadili

Badan pengadilan berwenang memeriksa peninjauan kembali adalah Mahkamah Agung. Demikian ditegaskan dalam pasal 70 ayat 2 M No. 14 Tahun 1985.⁵ Kewenangan tersebut bersifat mutlak. tidak bisa. didelegasikan kepada badan pengadilan yang lain.

⁴ Lihat M. Yahya Harahap, *op.cit* , hal. 410.

⁵ Jelasnya, lihat Undang-Undang No. 14/1985.

Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa. PK bertindak sebagai pengadilan "tingkat pertama dan terakhir". Apabila Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap perkara PK maka putusan bersifat "final". Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Ketentuan tersebut sangat logis dan rasional. Jika masih ada lagi kemungkinan upaya hukum terhadap putusan PK, maka kepastian hukum sulit untuk ditegakkan. Akan berlangsung proses yang tidak akan ada ujung pangkalnya. Padahal upaya peninjauan kembali itu sendiri sudah merupakan upaya hukum luar biasa yang sangat *eksepsional*. Tentu tidak wajar lagi untuk membuka kemungkinan upaya hukum terhadap putusan Peninjauan kembali.⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:

- a. Para pihak secara inperson,
- b. Ahli waris mereka
- c. Kuasa yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Dan yang berwenang untuk memeriksa peninjauan kembali adalah wewenang mutlak Mahkamah Agung dan merupakan upaya hukum yang terakhir diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

⁶ Lihat M. Yahya Harahap, *op.cit.*

C. Tenggang Waktu Permohonan Peninjauan Kembali

Tenggang waktu mengajukan permohonan Peninjauan kembali adalah 180 hari. Akan tetapi batas tenggang ini bukan semuanya didasarkan atas patokan perhitungan yang lama. Penerapan cara menghitung batas tenggang waktu 180 hari, berbeda untuk setiap alasan. Masing-masing alasan memiliki cara tersendiri dalam memperhitungkan batas tenggang waktu.

- a. Batas tenggang waktu mengenai kebohongan atau tipu muslihat adalah 180 hari terhitung sejak tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat.⁷ Kalau sekiranya kebohongan atau tipu muslihat baru diketahui 10 Tahun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tenggang waktu mengajukan permohonan PK adalah 180 hari setelah diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat.⁸
- b. Jika kebohongan atau tipu muslihat telah diproses dalam perkara pidana, dan pihak lawan yang bohong dan melakukan tipu muslihat sudah jatuh hukuman, batas tenggang waktunya adalah 180 hari dari tanggal putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹
- c. Batas tenggang waktu mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali atas alasan diketemukan "bukti baru" adalah 180 hari dari tanggal

⁷ Lihat Pasal 69 Undang-Undang No. 14/1985.

⁸ Batas tenggang waktu 180 hari, bukan dihitung dari tanggal jatuhnya putusan, lihat Harahap, *loc.cit*.

⁹ *Ibid*,

diketemukan surat-surat bukti tersebut.¹⁰

- d. Mengenai alasan yang disebut pada pasal 67 huruf c, d dan f adalah 180 hari dari tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti putusan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.¹¹
- e. Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan ada dua putusan yang saling bertentangan, adalah 180 hari dari tanggal putusan yang terakhir berkekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan secara resmi kepada kedua belah pihak yang berperkara.¹²

M. Yahya. Harahap telah mengemukakan bahwa tenggang waktu mengajukan permohonan PK adalah 180 hari. Akan tetapi batas tenggang tersebut bukan semuanya didasarkan atas patokan perhitungan yang sama.

Penerapan cara menghitung batas tenggang waktu 180 hari, berbeda untuk setiap alasan. Masing-masing alasan memiliki cara tersendiri dalam memperhitungkan batas tenggang waktu.¹³

Dalam praktek hal ini sering kurang disadari oleh para pencari keadilan. Malahan dari kalangan praktisi hukum yang berkecimpung dalam kegiatan pengacara, masih sering mengacaukan cara penerapan perhitungan batas tenggang waktu. Mereka menerapkan cara perhitungannya secara

¹⁰ *Ibid.* hal. 415

¹¹ Mengenai penentuan batas tenggang waktu pengajuan permohonan PK dalam alasan-alasan yang disebut pasal 67 huruf c, d dan f (telah terurai), dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam praktek peradilan. Jelasnya lihat *ibid.* h- 416.

¹⁶ Demikian halnya tenggang waktu permohonan atas alasan ada dua putusan yang saling bertentangan, sama acuan penerapannya dengan alasan c, d dan f. Lengkapnya lihat *Ibid.* hal. 417

¹³ Lihat Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 414.

generalisasi dengan mengambil patokan 180 hari dari tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 telah merinci cara perhitungan batas tenggang waktu untuk setup alasan.

Menurut ketentuan pasal tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Batas tenggang waktu mengenai alasan kebohongan atau tipu muslihat 180 hari terhitung sejak tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat. Kalau sekiranya kebohongan atau tipu muslihat baru diketahui 10 tahun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tenggang waktu mengajukan permohonan PK adalah 180 hari dari tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat. Bukan 180 hari dari tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴
- b. Jika kebohongan atau tipu muslihat telah diproses dalam perkara pidana, dan pihak lawan yang bohong dan melakukan tipu muslihat sudah dijatuhi hukuman, batas tenggang waktunya adalah, 180 hari dari tanggal putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵
- c. Batas tenggang waktu mengajukan alasan permohonan PK atas alasan diketemukan bukti baru adalah, 180 hari dari tanggal diketemukan surat-surat bukti baru tersebut.¹⁶

Dalam hal kepastian benar atau tidaknya hari dan tanggal diketemukan surat-surat bukti tersebut, diperlukan syarat formil berupa sumpah. yakni hari

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hal. 414

¹⁶ *Ibid.*

serta tanggal diketemukan surat-surat bukti baru harus dinyatakan di bawah sumpah, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

Tentang siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang mensahkan sumpah penemuan surat bukti, tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun penerapannya dalam praktek dapat dibenarkan oleh berbagai pejabat. Jadi sumpah dapat diucapkan pihak penemu di hadapan Camat, Panitera Pengadilan, Hakim, Pejabat Agraria dan sebagainya.¹⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat, terbatas, dan tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Demikian halnya batas tenggang waktu untuk pengajuan, telah dirinci sedemikian rupa guna menghindari adanya kesewenang-wenangan, baik dari pihak penegak keadilan atau penegak hukum maupun pihak pencari keadilan atau pihak yang berperkara.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

ANALISIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Alasan Putusan Pengadilan yang Dapat Ditinjau Kembali

Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah mutlak bersifat *litis finiri opperte*, yang berarti setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah bersifat *final*, tidak bisa diganggu gugat lagi. Pada diri putusan sudah terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak. Pada putusan hakim sudah mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak kepada para pihak. Juga dengan sendirinya menurut hukum telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak kepada para pihak sekaligus mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang mutlak kepada para pihak. Namun karena adanya hal-hal yang diketahui setelah putusan dijatuhkan, dimana hal tersebut sangat menentukan kemenangan dipihak terkalahkan, atau dalam putusan tersebut ternyata pihak hakim keliru atau salah dalam menerapkan hukum, baik dalam menerapkan hukum formil, maka putusan tersebut berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya. Alat-Alat Bukti dan hal-Hal yang diketahui Setelah Perkara Diputus.

Kemungkinan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan yang,

dianggap keliru atau batal dan dapat ditinjau kembali adalah adanya surat-surat bukti yang ditemukan dari pihak terkalahkan. Adanya surat-surat bukti sangat menentukan dan surat-surat bukti tersebut tidak didapati selama proses pemeriksaan atau persidangan sedang berjalan.¹ Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-undang No,14 Tahun 1985 mengenai alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.²

Kemungkinan lain suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata putusan tersebut didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, kemudian kebohongan atau tipu muslihat tersebut barn terbongkar dan dapat dibuktikan melalui putusan pidana.³ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat 1 sebagai berikut:

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.⁴

Demikian halnya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, ternyata putusan tersebut telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih dari yang dituntut.⁵ Hal ini sebagaimana

¹ Lihat M. Yahya. Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka. Kartini, 1989), hal. 408.

² Undang-Undang No. 14/85.

³ Lihat M. Yahya Harahap, *loc-cit.*

⁴ *Undang-Undang No. 14/1985*, pasal 67 ayat 1).

⁵ Lihat, M. Yahya Harahap, *loc-cit.*

tercantum di dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagai berikut:

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan batalnya putusan hakim dan dapat ditinjau kembali atas adanya alat-alat bukti yang ditemukan kemudian adalah: (a) adanya Surat-Surat bukti yang ditemukan, dan surat-surat bukti tersebut sangat menentukan menangnya pihak terkalahkan. (b) Putusan tersebut didasarkan kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan. (c) Adanya dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut

2. Adanya Kekeliruan atau Kesalahan yang Nyata Dari Pihak Hakim

a. Kesalahan dalam menerapkan hukum formil

Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara, dan mengakhiri sengketa atau perkara dengan adil dan benar.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah fakta atau peristiwanya.⁷

⁶ Undang-Undang No. 14/1985, (Pasal 67 ayat 3).

⁷ Lihat Sudikno Mertokusumo, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty,

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah. Pihak.⁸

Hakim dianggap tabu akan hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Oleh karena itu hakim adalah mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁹

Menemukan atau mencari hukum dalam suatu peristiwa, tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dicari hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya Undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkret.¹⁰

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undang-undangnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 faktor yang seyogyanya diterapkan pengadilan atau hakim secara *propesional*, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan pihak pengadilan atau hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan

1988). hal. 158.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hal. 159

¹⁰ *Ibid* hal. 160.

kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor, berarti mengorbankan faktor-faktor yang lain.¹¹

Hakim dalam mencari dan memutuskan hukum suatu perkara, hendaklah bersumber pada: (a) perundang-undangan, (b) hukum yang tidak tertulis, (c) putusan desa, (d) yurisprudensi, dan (e) ilmu pengetahuan.¹²

Hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan social yang hidup dalam masyarakat, dan ia harus memberi putusan berdasarkan atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu.¹³

Bahwa putusan desa merupakan sumber untuk menemukan hukum bagi hakim bagi hakim, yang diletakkan secara tertulis dalam pasal 12 a HIR.¹⁴ Putusan desa ini merupakan penetapan *administratif* oleh hakim perdamaian desa yang merupakan peradilan yang sesungguhnya. Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga, Ini berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai

¹¹ *Ibid.* hal 161

¹² *Ibid.* hal 162

¹³ Lihat Undang-Undang No 14 Tahun 1970 (Pasal 27 ayat 1)

¹⁴ Lihat Sudikno. *Loc cit.*

perkara yang sejenis yang pernah diputuskan.¹⁵

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum Perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum.¹⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim di dalam memutuskan suatu perkara, hendaklah memutuskan dengan adil dan benar, yang berlandaskan pada perundang-undangan yang telah diterapkan, hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi, putusan desa, dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim dalam memutuskan sesuatu perkara, ternyata menyalahi baik perundang-undangan, hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi dan lain-lain, maka putusannya berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 67 ayat 5 dan 6 yang dinyatakan bahwa peninjauan kembali putusan dapat diajukan sebagai berikut:

- a. Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- b. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau

¹⁵ Kalau tiap kali ada putusan mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.

¹⁶ Lihat *Ibid*.

suatu kekeliruan yang nyata.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara ternyata menyalahi ketentuan baik dalam menerapkan hukum material maupun dalam mempertahankan hukum formil, maka hal itu putusannya berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Islam telah menetapkan bahwa landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu: (a) nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Moran dan Surinah, (b) hukum-hukum yang telah disepakati oleh Ulama dan (c) hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti.¹⁸

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu terdapat hukumnya di dalam nash atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh ulama", atau telah diketahui secara dilaluri oleh kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang tersebut itu, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.¹⁹

Apabila hakim menjatuhkan dengan putusan dengan ijtihadnya sendiri, dan ternyata keputusannya tersebut bertentangan dengan nash kitab (Al-Qur'an) atau sunnah, atau ijma atau qiyas jaly, maka keputusannya menjadi

¹⁷ Anonim, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung* (Jakarta: Sekretariat, Negara, 1985), hal. 26.

¹⁸ Lihat Muhammad Salam Madkur, *Alqadla Fit Islam* Kairo: Dar Nandah, al-Arabiyyah, 1970, hal. 93,

¹⁹ *Ibid.*

batal, baik sebagian hakim maupun bukan hakim.²⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, ternyata menyalahi nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan Hadits, hukum -hukum yang telah disepakati oleh para ulama, dan hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti, maka putusan tersebut berhak dibatalkan dan dapat ditinjau kembali.

2. Kesalahan dalam menerapkan hukum formil

Adapun kesalahan hakim dalam menerapkan hukum formil antara lain:

a. Tidak mendengar kedua belah pihak

Dalam Hukum Acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, bahwa mengadili menurut hukum dengan tidak mendengar orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkaranya harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan yang tidak dengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan

²⁰Sebagaimana. dikutip, Departemen Agama. RI, *Komplikasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam*, Jilid III (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hal. 34.

pendapatnya.²¹

b. Tidak terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Dengan tujuan untuk memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.²² Asas ini dijumpai dalam pasal 17 dan 18 UU. 14/1970.

c. Hakim tidak bersifat passif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau *lu's* pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim-hakim hanyalah membantu para pencari keadilan atau pihak berperkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.²³

d. Putusan tidak disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya

²¹ Lihat Sudikno, *op-cit.*, hal. 12.

²² Lihat *Ibid.*, hal. 11.

²³ *Ibid.*, hal. 10

terhadap masyarakat, sehingga karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan itulah makes putusan mempunyai wibawa dan bukan karma hakim tertentu yang menjatuhkan.²⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses jalannya persidangan peradilan, pada prinsipnya ditegaskan hendaknya persamaan hak di muka hukum harus dilaksanakan, guna terciptanya keadilan dan kebenaran yang dikehendaki

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam hukum Islam: sangat ditegaskan agar persamaan hak di hukum harus ditegakkan. Hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur bahwa apabila hakim duduk mengadili pihak-pihak yang bersengketa, maka haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada yang menjadi perhatiannya selain pemeriksa perkara itu, dan jika keadaannya berubah sebab marah, susah, gembira yang berlebihan, sakit atau bosan, lapar atau mengantuk, maka berdirilah, sampai keadaan normal kembali bare melanjutkan sidang.²⁵

Dan di masa Nabi SAW. sampai masa-masa khalifah-khalifah sesudahnya, sidang pengadilan selalu diadakan di tempest terbuka di Mesjid atau di tempest umum yang tidak ada larangan orang lain mengikuti jalannya persidangan, jadi prinsipnya persidangan dalam peradilan Islam adalah terbuka dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan sengketa itu

²⁴ *Ibid.* hal. 13

²⁵ Lihat Muhammad Salam Maskur, *op cit.* hal. 48

diikut sertakan, sehingga perkara itu selesai membawa ketenangan.²⁶

Dan hakim tidak boleh memutus perkara yang saksi-saksinya terdiri dari orang-orang yang tidak dapat di terima kesaksiannya seperti ayah, anak atau isteri, dan tidak boleh juga terhadap orang yang kesaksiannya itu ada permusuhan antara keduanya, dan apabila putusan tetap dijatuhkan, maka putusan tersebut dimohonkan untuk dibatalkan.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hendaklah tidak memihak antara pihak-pihak yang berperkara, dan tidak diperkenankan memutus perkara yang saksi-saksinya terdiri dari orang-orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Jika hal tersebut putusan tetap dijatuhkan, maka putusan tersebut berhak dibatalkan dan dapat di-tinjau kembali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat menegakkan adanya keadilan, kebenaran, dan persamaan hak dimuka hukum harus ditegakkan.

Demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Islam bukan saja membina mental para hakim agar tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga membina pihak lain tidak memberikan berupa apa saja, dengan maksud agar hakim dapat mempertimbangkan putusannya.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keadilan,

²⁶ *Ibid.* hal. 49

²⁷ *Ibid.* hal 50

kejujuran dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan suatu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat termasuk di dalamnya badan-badan peradilan atau para hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan peradilan. Hal ini berarti akan memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atau terdakwa selama masuk dalam proses penyelesaian perkara untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menghormati pribadi orang lain secara terang-terangan diperintahkan, bahkan ada larangan untuk memperolok-olokkan orang lain. Pada waktu yang sama konsepsi tentang tanggungjawab manusia mengandung kewajiban untuk mengakui, memelihara, menetapkan kehormatan diri sendiri. Dalam pandangan ganda inilah yang patut dihormati dan dipahami oleh setiap manusia.²⁸

Untuk terjadinya keadilan yang merata bagi setiap individu untuk mendapatkan kehormatan bagi dirinya diharapkan agar jaminan keadilan merata bagi setiap warga negara yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harus didengar setiap pengaduan rakyat tentang tidak terlaksananya kehormatan persamaan dalam hukum antara mereka dengan golongan yang berpangkat, terpengaruh dari pada wartawan, orang-orang yang kuat. Pengaduan itu harus disidangkan dari kepada mereka itu diminta supaya menghadap ke sidang pengadilan, tetapi jika pengaduan tidak

²⁸ Marcel A. Boisard, *Humanisma De Islam*, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 111.

disidangkan karena memang sengaja atau karena takut (diancam) maka ini berarti kehormatan persamaan yang diakui Undang-Undang telah menjadi tertawaan atau permainan yang disebabkan oleh kekacauan masyarakat.

- b. Setiap warga negara wajib merasakan adanya keadilan dalam segala prosedur peradilan, jika antara dua lawan yang berperkara itu wajib disamakan dalam cara keterangan keduanya, diberi kelonggaran untuk mengemukakan alasannya secara bebas sekali, tanpa diadakan perbedaan antara si miskin dan si kaya, si lemah dan si kuat dan si rendah dan si berpangkat tinggi.
- c. Pengadilan wajib berjalan berlandaskan Undang-Undang yang ditetapkan, terutama mengenai kehormatan adanya keberanian dan keadilan.²⁹

Seiring dengan hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dr. Anwar Harjono bahwa "persamaan hak dimuka hukum adalah salah satu ajaran pokok Islam."³⁰

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat menekankan persamaan hak dimuka hukum tanpa memandang kepada siapa saja, baik sebagai pejabat tinggi, kaya atau miskin dan lain-lain.

²⁹ Mustafa Husni Assiba'I *Isyitirakiyatu Fil Islam, dialih Bahasakan Oleh Oleh M. Abda'I Ratomi : Kehidupan Sosial Menurut Islam* (Bandung : CV. Dipenogoro, 1981) hal. 139

³⁰ "Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 214.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya peninjauan kembali atas batalnya putusan hakim adalah suatu upaya untuk mewujudkan persamaan hak dimuka hukum, demi tegaknya keadilan dan kebenaran ditengah masyarakat.

B. Tatacara Mengajukan Permohonan PK

Adapun mengenai tatacara pengajuan permohonan diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan dalam pasal 72 UU No. 14 Tahun 1985 sebagai berikut:

1. Disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan

Meskipun pasal 70 ayat 1 menyatakan permohonan PK diajukan kepada mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, tetapi menurut pasal 71 ayat 1 permohonan harus disampaikan atau dimasukkan atau kepaniteraan pengadilan.³¹

2. Permohonan berbentuk tertulis dan menyebut alasan.

Pasal 71 ayat 1 secara tegas menyebutkan bentuk permohonan PK. Bentuknya mesti “tertulis” dalam surat permohonan harus mencantumkan alasan yang sejelas-jelasnya yang menjadi dasar permohonan. Permohonan tertulis tersebut yang dimasukkan

³¹ Permohonan harus dimasukkan di kepaniteraan pengadilan, bukan langsung kepada ketua pengadilan, lihat *Ibid* hal. 417,

kepaniteraan.³²

3. Membayar Biaya Perkara yang diperlukan

Mengenai keharusan membayar perkara diatur dalam pasal 70 ayat

1. Pembayaran biaya perkara tampaknya dijadikan sebagai syarat formil permohonan PK. Selama biaya perkara belum dilunasi pemohon pelaksanaan administrasi yustisial atas pemohon ditunda, dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung tidak bisa dilaksanakan. Tentang jumlah perkara disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan.³³

4. Mengirim salinan permohonan kepada pihak lawan

Tatacara selanjutnya diatur dalam pasal 72, tata cara ini Baru dapat dilaksanakan Panitera setelah pemohon membayar biaya perkara yakni Panitera memberikan atau mengirimkan "salinan" permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.³⁴

5. Tenggang waktu Pengiriman salinan kepada lawan

Dalam melaksanakan kewajiban pemberitahuan atau pengiriman salinan permohonan kepada pihak lawan panitera harus berpegang kepada tenggang waktu yang ditentukan pasal 72 ayat 1. Yakni selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari tanggal penerimaan

³² Kalau pemohon tidak pandai menulis, ia menggunakan kartu permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Jelasnya lihat Pasal 71 ayat 2 UU No. 14/1985.

³³ Lihat Harahap, *op- cit.* , hal. 418.

³⁴ *Ibid.*

permohonan.³⁵

6. Kedudukan Pihak Lawan Atas permohonan

Mengenai Permohonan PK, disamping dia secara resmi berkedudukan sebagai termohon PK, khusus untuk menghadapi "salinan" Surat permohonan yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, termohon mempunyai dua kedudukan yang disesuaikan dengan alasan permohonan PK yang diajukan kepadanya.

a. Berhak mengajukan -jawaban"

Inilah kedudukan yang semua pihak lawan atau termohon PK jika permohonan PK didasarkan alas alasan yang disebut dalam pasal 67 huruf a atau b. Menghadapi alasan permohonan PK yang semacam itu, pihak lawan dapat aktif mengajukan jawaban sebagai kontrak terhadap permohonan.

b. Berkedudukan sebagai pihak "agar dapat mengetahui-.

Kedudukan pihak lawan yang kedua bersifat "pasif" pemberian atau pengiriman salinan Surat permohonan PK, tidak menimbulkan hak apa-apa. pemberian atau pengiriman tersebut hanya untuk sekedar agar pihak lawan dapat mengetahui adanya permohonan PK dari pihak pemohon. Kedudukan pasif seperti itu

³⁵ Mengenal keterlambatan panitera mengirim salinan permohonan, tidak dapat diganjar, hanya dapat dianggap melanggar tugas jabatan, lihat *ibid*.

ditempatkan undang-undang kepada pihak termohon apabila permohonan PK didasarkan atas alasan yang ditentukan dalam pasal 67 huruf c, d dan f.³⁶

7. Tenggang waktu mengajukan jawaban

Sebagaimana telah terurai, pihak lawan atau termohon FK berhak mengajukan jawaban alasan permohonan PK apabila permohonan didasarkan atas alasan didalam pasal 67 huruf a dan b. Tenggang waktu untuk mengajukan jawaban menurut pasal 27 ayat 2 ialah 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK. Lewat dari tenggang waktu tersebut, dianggap dia tidak akan mengajukan jawaban, dan berkas perkara serta Surat-Surat yang berhubungan dengan permohonan PR Sudan dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung- Jika pihak lawan ada mengajukan jawaban, tata caranya adalah sebagai berikut:

a. Jawaban diserahkan atau dikirimkan ke pengadilan yang bersangkutan.

b. Tugas panitera atas surat jawaban

Tugas Panitera atas surat jawaban adalah membubuhi hari, tanggal, dan cap penerimaan surat jawab kepada pemohon untuk diketahui.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

8. Pengiriman berkas perkara

Pengiriman berkas perkara diatur dalam pasal 72 ayat 1 yang menentukan tiga hal sebagai berikut:

- a. Yang kepada Mahkamah Agung ialah berkas perkara secara keseluruhan secara lengkap.
- b. Biaya perkara, dan
- c. Tenggang waktu pengiriman selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.³⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tatacara pengajuan permohonan peninjauan kembali, tidaklah terlalu sulit untuk dilaksanakan, Hanya saja melalui beberapa syarat-syarat tertentu; hal ini untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan baik dari pihak pengadilan atau hakim sebagai penegak hukum, maupun dari pihak yang berperkara Berbagai pencari keadilan; dalam hal ini adalah yang terkalahkan dan yang memenangkan.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan

Dengan adanya Peninjauan Kembali, Yakni di-undang- Undang No' 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat aturan tentang peninjauan kembali atas batalnya putusan hakim yang

³⁸ Tenggang waktu pengiriman 30 hari yang dimaksud, adalah 30 hari dari habisnya kesempatan termohon mengajukan jawaban dalam alasan PK, jelasnya lihat Anonim, *loc.cit.*

dianggap keliru atau kesalahan yang nyata, dan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yang memuat pasal-pasal mengenai aturan pelaksanaannya; hal ini suatu upaya akan pentingnya keadilan dan kebenaran Yang harus ditegakkan, sebagai menipestasi adanya hak-hak asasi setiap manusia.

Hukum Islam datang untuk Mengangkat hak-hak kemanusiaan dari ikatan-ikatan yang membelenggu kebebasan manusia dan menjaga hak kemanusiaan itu agar tidak dipermainkan dan disalahgunakan yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan berusaha, kebebasan berteduh, kebebasan memperoleh keadilan dan lain-lain kebebasan yang merupakan sendi-sendi kepribadian seseorang.³⁹

Dalam hal memperoleh keadilan misalnya, hukum Islam sangat menekankan agar keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan hak kepada yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia.⁴⁰

Persamaan hak dimuka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam. Baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti Yang terbatas, yakni hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun dalam arti Yang luas, yakni hubungan muamalat antara manusia dengan manusia. Hukum Islam mengakui

³⁹ Lihat Sayyid Sabiq, *Anasirul Kuwait Fil Islam* diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, *Sumber Kekuatan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hal. 185.

⁴⁰ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhi As-Sunnah*, Jilid V (Beirut: Daar al-Fkr), 1977, hal. 20.

Dalam Kaitan tersebut, Allah telah menurunkan "konstitusi hidup" untuk di dunia dan akhirat, dan telah menerangkan kepada hambanya, kewajiban-kewajiban Para hakim dan mahkum, serta kepada siapa kewajiban menyampaikan hak itu dibebankan, dan kewajiban hakim untuk tunduk &an tact dalam batas-batas "radiasi" perintah-perintahnya.⁴² Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa'(4): 58.

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu. menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.⁴³

Al-Zamakhshary Mengemukakan bahwa dalam ayat ini Allah SWT. Memerintahkan kepada pemimpin untuk menunaikan amanah yang diberikan kepadanya dan bila memutuskan sesuatu hendaklah dengan cara yang adil.⁴⁴

⁴¹ Lihat Anwar Harjono), *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang 1987), hal. 214.

⁴² Lihat Muhammad Salam Madkur, *Al- Qadli Fil Islam* (Kairo: Daar Nandah al-Arabiyyah, 1974), hal. 11

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), hal. 128.

⁴⁴ Lihat Aby al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar al-Zamakhshary, *Al-Kasysyafan Haqaiq al-Tanzil Wa'Uyun al-Aqawil Fi Wuyun al-Ta'wil*, Juz I ,Beirut: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th., hal.. 535.

Pada ayat lain Allah berfirman di dalam Q.S. Al-Hadid (57): 25⁴⁵ sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah mengutus rascal-rascal kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya, Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.⁴⁵

At-Tabari menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang jelas dan menurunkan kitab yang mengandung hukum-hukum, syariat dan neraca (keadilan). Menurut Qatadah, *al-Mizan* adalah al-Haq (kebenaran) hal ini adalah apa yang dapat diterima dan diamalkan.⁴⁶

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan dan kebenaran harus tegak di tengah-tengah masyarakat, dengan tidak pilih kasih baik kerabat, teman, musuh, dan sebagainya, dan kezaliman harus diluruskan dan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op- cit*, hal. 904.

⁴⁶ Lihat Aby Ja'far Muhammad bin Jarir 'al-Tabari, *Jam' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, Juz XXVII, t.tp., Mustafa al-Babi al-Halabi, hal. 236.

bile perlu dengan kekerasan dalam arti bahwa bila. terjadi ke sewenang-wenangan di antara umat manusia adalah keharusan untuk menghilangkannya sesuai kemampuan masing-masing. Dan perlu dicatat bahwa keadilan harus menjadi alat penukar dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai social masyarakat baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Karenanya, demi tegaknya keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, maka setiap putusan hakim yang dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan perlu ditinjau kembali. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur bahwa kepada qadli qadlat diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan di bawahnya dan membatalkan putusan yang di pandang tidak benar, maka ditetapkannya sebagaimana adanya.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya Peninjauan Kembali atas putusan hakim atau pengadilan yang dianggap keliru menurut Undang-Undang No. 14/1970 dan menurut Undang-undang No.14 Tahun 198, sesuai dengan hukum Islam.

⁴⁷ Lihat Muhammad Salam madkur, *op, cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peninjauan kembali putusan merupakan pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang diatur menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kehakiman dan Undang-undang No_14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksanaannya.
2. Alasan-alasan putusan pengadilan yang dapat ditinjau kembali karna adanya alat-alat bukti yang sangat menentukan ditemukan setelah putusan dijatuhkan. Adanya kekeliruan atau kesalahan yang nyata dari pihak hakim, seperti kesalahan dalam menerapkan hukum formil. Adanya kesalahan yang nyata dari pihak hakim baik menyalahi hukum materil maupun salah dalam menerapkan hukum formil. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan adanya peninjauan kembali putusan pengadilan merupakan suatu upaya hukum akan pentingnya keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan; sebagai manifestasi adanya hak-hak asasi setiap manusia.
3. Tatacara peninjauan kembali putusan pengadilan adalah disampaikan di kepaniteraan pengadilan. Permohonan dalam bentuk tertulis atau lisan dan menyebut alasan. Mengirim salinan permohonan kepada pihak lawan. Tenggang waktu pengiriman salinan putusan selambat-lambatnya 14 hari

setelah penerimaan permohonan. Pihak lawan mengajukan jawaban. Tenggang waktu untuk mengajukan jawaban 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan peninjauan kembali. Hal tersebut sesuai dengan hukum acara peradilan Islam

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan yang merasa dijatuhi putusan yang dianggap salah, baik kesalahan dari pihak lawan maupun kesalahan yang nyata dari pihak hakim, hendaknya tidak Begang-Begang mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk memperoleh hak, keadilan dan kebenaran.
2. Sebagai hakim yang diberi amanah untuk memutuskan suatu perkara, hendaknya memutuskan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, demikian hendaknya kedua pihak yang berperkara dipersamakan di muka hukum, agar putusan yang nantinya diterima baik oleh kedua belah pihak; agar tercipta keadilan, kebenaran dan ketenteraman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Our"anul Karim.

Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, Jakarta: Interamas 1991.

_____. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,, 1994.

Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqhi Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Abu Daud, Sulaeman Imam Hafid. *Sunan Abu Daud*, Mesir: Maktabah Wamatbaah, 1952.

Anonim. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1991/1992

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insan Press, 1993.

Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: al-Ma'arif, 1964.

Azhari, Tahir. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif*, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.

Badjeber, H. Zain, dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-Undang Mo.7 Tahun 19989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

_____. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1981.

- Al-Bakry, Shalah Abdul Oadir. *Al-Qur'an Na Bina Al-Insan* diterjemahkan oleh Abu Laila dan Muhammad Tohir, dengan judul *Q-Qur'an dan Pembinaan insan* Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1984/1985.
- Departum Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Halim, Abdullah. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamid, A.T. *Hukum Acara Perdata Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina ilmu, 1986.
- Harahap, Yahya, M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: raja. Grafindo Persada, 1995.
- Al-Kazwiny, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, juz II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadla Fil Islam*, Kairo: Dar an- Nandah, 1969.
- Manan, Bagir. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Al-Mawardi. *Ahkam A-Sultaniyah*, Mersir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXVII, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1974.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Noeh, H. Zaini Ahmad. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: intermasa, 1980.
- Al-Qusyairi, Imam Abu Husaeni Muslim bin Hajja al- Naesaburi. *Shahih Muslim*, Mesir: Isa al-Bab al- Halab, 1975.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1972.
- Sjawie, F. Hasbullah. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan, Kehakiman dan Lingkungan Peradilan, Jakarta: Lenter, 1993.
- At-Tirmidzi, imam al-Hafid Abu Isa Muhammad bin Isa. Sunan at-Timidziy, Mesir: Maktabah Wa Matbaah, 1955.
- Rasyid, H. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.



RIWAYAT HIDUP

Ismail dilahirkan di Dusun Tallo Desa Bala pada tanggal 25 Juli 1987. Anak ke sembilan dari sebelas bersaudara buah cinta dari pasangan Muhammad dengan Ruhaimah Binti Abdullah. Masa kecil yang sangat indah sekaligus menyenangkan sepenuhnya dihabiskan di desa kelahiran yaitu Pambusuang. Mulai mengenal pendidikan formal di SD Negeri 065 Bala pada Tahun 1995, dan menamatkan pada tahun 2000 di Tahun yang sama penulis menempuh pendidikan menengah pertama di MTs Pambusuang dan menamatkan pada tahun 2003 kemudian, penulis melanjutkan studinya di MAN Polman 2003 sekaligus menamatkan pada tahun 2006, dan di tahun yang sama penulis mengikuti SPMB dan berhasil terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Dan akhir perjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam"***.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R